



JOURNAL IDEA OF HISTORY

e-ISSN 2014-4393
p-ISSN 2598-7828
Volume 2 No. 2 Juli - Desember 2019

JOURNAL IDEA OF HISTORY Volume 2 No. 2 Juli - Desember 2019



Jurusan Ilmu Sejarah
Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Halu Oleo
Kendari

Journal Idea Of History

Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Halu Oleo

Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Ilmu Budaya UHO
Ketua Jurusan Ilmu Sejarah

Editor-In-Chief

Dr. Aslim, S.S., M.Hum.

Editor

Dra. Aswati M., M.Hum
Dr. La Ode Ali Basri, S.Pd., M.Si.
Dr. Basrin Melamba, S.Pd., M.A.
Fatma, S.Pd., M.A.
Faika Burhan, S.S., M.A.
Raemon, S.Sos., M.A.
Sarman, S.Pd., M.Pd.
Hasni Hasan, S.Pd., M.Si.
Suharni Suddin, S.Pd., M.Pd.
Evang Asmawati, S.Pd., M.Hum.
Khabiirun, S.Sos., M.Sos.

Reviewer

Prof. Dr. Drs. I Nengah Duija, M.Si. (IHDN Denpasar)
Haliadi Sadi, S.S., M.Hum., PhD. (Univ. Tadulako)
Hendra, M.Phil., M.A. (Univ. Tadulako)
Dr. Ilham Daeng Makkelo, M.Hum. (Univ. Hasanuddin)
Asyhadi Mufsi Sadzali, S.S., M.A. (Univ. Jambi)

Desain Grafis:

Masrin, S.IP., M.A.P

Alamat Redaksi

Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo
JL. H.E.A Mokodompit Kendari

SEJARAH TERBENTUKNYA DESA BANGKALI KECAMATAN WATOPUTE KABUPATEN MUNA : 1976-2017

Oleh:

Ahmad Jaya

Fatma

(Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Halu Oleo)

Abstract

This study aims to describe the history of the formation of Bangkali Village, Watopute District, Muna Regency. The method used in the study was the historical method developed by Kuntowijoyo through five stage of work, namely: (1) Topic Selection, (2) Collection of courses, (3) references verification (critical sources thought external and internal critical sources) and (4) sources Interpretation (analysis and synthesis) and (5) Historiography (historycal writing). The lliterature review in this study consisted of the conceptual framework and the theoretical framework. The conceptual framework used the concept of regional expansion, the concept of rural history, and the concept of village and village governance. The theoretical framework used elite circulation theory. The findings of the research showed that: (1) Bangkali Village was formed due to consideration of the area and population density conditions which were sufficient to be expanded. (2) The process of establishing Bangkali Village, namely: (a) It was begun with government policy that each hamlet far from the parent village must be divided so that it is easy in the administrative process. (b) Support from the village community and community leaders to immediately propose the division of the village to the regional government. Then, Bangkali Village was formed on April 15th, 1976 through decree number 27 of 1976 concerning the division of villages in Wali Village. (3) The development of Bangkali Village in 1976-2017 in general showed a fairly good development in the fields of politics, general government, infrastructure, and economy.

Keyword: History, Background, Process and Development

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sejarah terbentuknya Desa Bangkali Kecamatan Watopute Kabupaten Muna. Penelitian ini menggunakan metode sejarah menurut Kuntowijoyo yang terdiri atas: (1) Pemilihan Topik, (2) Pengumpulan Sumber, (3) Verifikasi Sumber (Kritik sumber melalui krikitik eksternal dan kritik internal), (4) Interpretasi Sumber (Analisis dan Sintentis), (5) Historiografi (Penulisan Sejarah). Kajian pustaka dalam penelitian ini terdiri dari kerangka konsep dan kerangka teori. Kerangka konsep yang digunakan yaitu konsep pemekaran wilayah, konsep sejarah pedesaan, dan konsep desa dan pemerintahan desa. Kerangka teori menggunakan teori sirkulasi elit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Desa Bangkali dibentuk karena pertimbangan luas wilayah dan kondisi kepadatan penduduk. (2) Proses terbentuknya Desa Bangkali yaitu: (a) Diawali dengan kebijakan pemerintah bahwa setiap dusun yang jauh dari desa induk harus dimekarkan agar mudah dalam proses administrasi. (b) Dukungan dari masyarakat desa serta tokoh masyarakat untuk segera mengusulkan pemekaran desa tersebut kepada pemerintah daerah. Kemudian terbentuklah Desa Bangkali pada tanggal 15 April 1976 melalui surat keputusan nomor 27 tahun 1976 tentang pemekaran desa-desa yang ada di Desa Wali. (3) Perkembangan Desa Bangkali tahun 1976-2017 secara umum menunjukkan perkembangan yang cukup baik di bidang politik, pemerintahan umum, infrastruktur, dan ekonomi.

Kata Kunci: Sejarah, Latar Belakang, Proses, dan Perkembangan

1. PENDAHULUAN

Kecenderungan pemekaran wilayah sudah lama terjadi di Indonesia, jauh sebelum adanya Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999. Pemekaran tersebut terjadi baik pada tingkat propinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan ataupun desa. Pemekaran wilayah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pelayanan kepada masyarakat, percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi, percepatan pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban dan peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah (Marbun, 2005: 9).

Pemekaran daerah atau wilayah adalah proses memecah sebuah provinsi, kabupaten ataupun kota menjadi dua wilayah teritorial (atau lebih) yang baru. Arti pemekaran daerah adalah memisahkan suatu bagian wilayah yang merupakan satu kesatuan yang utuh menjadi beberapa bagian yang berdiri sendiri. Pemekaran tersebut bertujuan untuk memudahkan pengurusan administrasi serta dapat mengurus rumah tangganya sendiri (Marbun, 2005: 50).

Di Sulawesi Tenggara, pemekaran wilayah khususnya pemekaran wilayah pedesaan juga terjadi di Kabupaten Muna. Pemekaran wilayah khususnya pemekaran wilayah desa dan kelurahan telah terjadi beberapa kali. Hal itu dapat dicermati dalam data BPS (Biro Pusat Statistik) Kabupaten Muna. Data pemekaran jumlah desa di Kabupaten Muna berjumlah 205 desa, 31 kelurahan, dan 5 unit pemukiman transmigrasi (UPT), (BPS, 2013).

Istilah pemekaran berasal dari kata “mekar”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Setiawan, 2010), mekar diartikan “mulai berkembang, mengurai, bangun dan menjadi banyak”. Dari kata mekar maka pemekaran artinya pengembangan sesuatu menjadi banyak seperti pemekaran Desa Bangkali dari Desa Wali. Dalam Undang-Undang, pemekaran wilayah diganti istilah menjadi pemecahan desa hal ini tercantum dalam UU No. 5 Tahun 1979. Dengan demikian, pemekaran wilayah yang dimaksud dalam penulisan ini sama dengan pemecahan desa sebagaimana diatur dalam ketentuan umum.

Konsep desa mengandung makna adanya keterkaitan yang lebih luas, baik secara ekologis, ekonomis, dan sosiologis. Dalam konteks ini konsep desa mengandung pengertian pertama “ikatan sosial” yang berlandaskan teritorial dimana masyarakat kawasan tersebut hidup dalam suatu lokalitas tertentu dengan eksistensi yang jelas. Kedua, “ikatan sosial” berdasarkan pekerjaan (profesi) yang mana hubungan antara anggota tidak permanen, tetapi mempunyai intensitas interaksi yang tinggi dalam suatu waktu tertentu. Ketiga, “ikatan sosial” yang dibangun berdasarkan jaringan sosial sebagai nilai tambah dari modal sosial dengan satu fokus interaksi pada pengembangan masyarakat.

Menurut Suryadiningrat (1992: 12) desa adalah sebutan untuk tempat tinggal, kelompok-kelompok rumah rakyat. Di Indonesia terdapat beraneka nama untuk kelompok rumah-rumah misalnya *kampung* (Jawa Barat), *gampong* (Aceh), *huta* atau *kuta* (Tapanuli), marga (Sumatera Selatan), genorij (Maluku), nigari Minangkabau), dusun (Lampung), wanua (Minahasa), gaukay (Makasar) dan sebagainya. Adanya berbagai istilah untuk kelompok tempat tinggal bersama itu menunjukkan bahwa yang disebut desa sekarang ini telah ada di Indonesia jauh sebelum orang Eropa atau bangsa lain datang.

Nurcholis (2011: 2) menyatakan pandangannya bahwa desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sekelompok orang yang saling mengenal, hidup gotong-royong, memiliki adat-istiadatnya yang relatif sama, dengan mempunyai tata cara tersendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatan. Sebagian besar mata pencahariannya adalah sebagai petani dan nelayan. Pada desa daratan sebagian besar penduduknya mencari kehidupan sebagai petani baik sawah ataupun kebun. Sementara pada desa pesisir, sebagian besar penduduknya mencari kehidupan sebagai nelayan.

Adapun ciri-ciri kehidupan masyarakat desa yakni desa dan masyarakat memiliki hubungan yang erat dengan alam komunitas dalam kesatuan geografi tertentu. Masyarakat saling mengenal dengan baik dan banyak bergantung pada alam. Penduduk di desa merupakan suatu unit sosial dan unit kerja yang jumlahnya relatif tidak besar dan struktur ekonomi relatif agraris. Masyarakat desa mewujudkan suatu perubahan dinamis ikatan kekeluargaan yang erat.

Sejarah pemekaran Desa Bangkali dapat diteliti menggunakan teori sirkulasi elite. Menurut Pareto dalam Garna (1993: 22) bahwa elit adalah suatu kelas orang-orang yang memiliki peringkat teratas di bidang aktivitasnya. Teori ini merupakan suatu teori lingkaran perubahan sosial yang membahas tentang beberapa tahapan atau peredaran tertentu yang akan dilewati lebih dari sekali, atau berulang kali oleh setiap budaya. Elit merupakan orang-orang yang berhasil dan mampu menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. Pareto juga percaya bahwa elit yang ada pada pekerjaan dan lapisan masyarakat yang berbeda itu umumnya datang dari kelas yang sama; yaitu orang-orang yang kaya dan juga pandai, yang mempunyai kelebihan dalam matematika, bidang musik, karakter moral dan sebagainya. Karena itu menurut Pareto dalam Garna (1993: 28) masyarakat terdiri dari 2 kelas: (1) lapisan atas, yaitu elit, yang terbagi ke dalam elit yang memerintah (*governing elite*) dan elit yang tidak memerintah (*non-governing elite*), (2) lapisan yang lebih rendah, yaitu non-elit. Pareto sendiri lebih memusatkan perhatiannya pada elit yang memerintah, yang menurutnya berkuasa karena bisa menggabungkan kekuasaan dan kelicikan, yang dilihatnya sebagai hal yang sangat penting. Jadi pemeran utama dalam teori ini yaitu para penguasa yang memerintah seperti menteri, senator, ketua pengadilan dan senator yang secara langsung maupun tidak langsung menangani peranan penting dalam lingkaran perubahan kekuasaan politik. Pareto dalam Garna (1993: 42) juga mengemukakan bahwa sistem sosial atau masyarakat ditegakkan oleh para individu dan selalu mengarah pada keseimbangan.

Gejala pergantian kaum elit merujuk kepada suatu keadaan manakala orang-orang yang tak termasuk kaum elit naik menjadi orang yang berkuasa, dan kekuasaan orang-orang yang berkuasa kemudian jatuh. Menurut Pareto, seluruh sejarah politik, khususnya sejarah revolusi, membuktikan bahwa revolusi tidak dibuat dan dikemukakan oleh rakyat biasa tetapi hanya oleh segelintir orang-orang tertentu saja. Dengan demikian apa yang disebut perubahan politik, perubahan haluan negara dan revolusi, pada dasarnya hanya merupakan pergantian kaum elit yang berkuasa. Sedangkan partisipasi rakyat biasa dalam revolusi tidaklah lebih berarti dari pada mereka yang melakukan huru-hara dan berteriak-teriak di jalanan. Revolusi datang melalui akumulasi pada strata atas suatu masyarakat. Umumnya para anggota strata bawah dipandu oleh pemimpin strata atas tersebut karena merekalah yang memiliki kualifikasi intelektual dalam penentuan taktik, sedangkan residu penyerangan dilakukan oleh para anggota strata bawah.

Kaum elit yang merebut kekuasaan fisik itu, disebut *the Lions*. Pada suatu ketika bila situasi negara menjadi tegang maka hanya orang kuat dalam arti fisiklah yang dapat menyelamatkan negara. Situasi semacam itu sering kali timbul di waktu perang atau akibat suatu perpecahan dari dalam masyarakat sendiri. Kondisi krisis seperti itulah yang memberi peluang kepada yang kuat (pada umumnya dari militer) untuk mengambil kekuasaan.

Berkaitan dengan penelitian ini bahwa proses perubahan status Desa Bangkali dari kampung menjadi desa tidak terlepas dari bagian sirkulasi atau rotasi elit di dusun Bangkali. Artinya dengan terbentuknya Desa Bangkali maka elit-elit Bangkali ketika masih berstatus dusun akan bersirkulasi menjadi elit pemerintahan desa. Sebagian warga Desa Bangkali yang sebelumnya tidak memegang peran dalam pemerintahan akhirnya mulai memiliki peran sebagai aparat pemerintahan.

Penelitian telah dilaksanakan selama tiga bulan, mulai bulan Februari sampai bulan April Tahun 2018. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bangkali Kecamatan Watopute Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara. Penelitian ini merupakan jenis penelitian sejarah desa yang bersifat deskriptif

kualitatif, yaitu suatu jenis penelitian di mana peneliti berusaha mendeskripsikan data-data dan fakta-fakta yang diperoleh. Penelitian ini menggunakan pendekatan strukturalis yaitu memadukan antara domain peristiwa dengan domain struktural sehingga sejarah dapat dijelaskan secara utuh dan komperensif (Leirissa, 1996: 12).

Dalam penelitian ini digunakan sumber sejarah yaitu sumber tertulis, sumber lisan dan sumber visual. Sumber tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sumber tertulis yaitu data yang diperoleh dalam bentuk buku, skripsi, arsip, dan sumber-sumber tertulis lainnya. Sumber-sumber tersebut diperoleh di Perpustakaan Universitas Halu Oleo, Perpustakaan FIB, dan Perpustakaan Daerah Sulawesi Tenggara, serta kantor Desa Bangkali.
- b. Sumber lisan yaitu data yang diperoleh melalui keterangan lisan atau wawancara dengan tujuh (7) orang informan yang mengetahui dan bisa memberikan gambaran tentang sejarah Desa Bangkali.
- c. Sumber visual yaitu data yang diperoleh melalui pengamatan secara langsung dan pendokumentasian dalam bentuk foto terhadap berbagai macam bentuk kegiatan-kegiatan warga serta sarana dan prasarana Desa Bangkali.

Penelitian ini menggunakan metode sejarah menurut Kuntowijoyo (2013: 69-80) yang terdiri atas lima (5) tahap yaitu: Pemilihan Topik, Pengumpulan Sumber, (3) Verifikasi Sumber (Kritik sumber melalui kritik eksternal dan kritik internal), (4) Interpretasi Sumber (Analisis dan Sintentis), (5) Historiografi (Penulisan Sejarah).

2. PEMBAHASAN

2.1 Sejarah Terbentuknya Desa Bangkali

Pada mulanya penduduk tidak mengenal pemukiman di kampung. Namun setelah penduduk mulai mengenal hidup menetap maka jalan poros Bangkali mulai dibuka. Sejak saat itu barulah mulai dibangun rumah-rumah kecil untuk tempat tinggal yang berada di pinggir jalan pada jarak tertentu. Sekeliling rumah kemudian dijadikan kebun kecil untuk menanam kebutuhan seperti pisang, kelapa, sirih dan lain-lain. Sementara ladang jagung masyarakat Bangkali terdahulu berada pada jarak tertentu yang tidak terlalu jauh. Masyarakat setempat mengenal tempat tersebut dengan sebutan *Molo*.

Desa Bangkali sebelumnya merupakan bagian dari Desa Wali. Desa Bangkali mekar dari Desa Wali sejak tahun 1976. Kebijakan pemekaran desa ini dimaksudkan untuk memperlancar pelayanan kepada masyarakat, sebab masyarakat Dusun Bangkali yang terletak di ujung barat Desa Wali, merasa sangat kesulitan jika mengurus hal-hal yang terkait dengan urusan kependudukan, pelayanan administrasi dan lain-lain. Begitu pula dengan perangkat Desa Wali mengalami kesulitan memberikan pelayanan yang maksimal kepada warga Desa Wali khususnya Dusun Bangkali karena wilayah Desa Wali yang begitu luas. Alasan tersebut menjadi dasar tokoh-tokoh masyarakat Desa Bangkali mengajukan permohonan kepada pihak pemerintah daerah.

Perangkat Desa Wali mengalami kesulitan memberikan pelayanan maksimal kepada warga Desa Wali khususnya Dusun Bangkali karena wilayah Desa Wali yang terlalu luas. Panjang Desa Wali pada saat itu yaitu mencapai 7 kilometer. Hal tersebut semakin mendorong tokoh-tokoh masyarakat Desa Bangkali untuk berusaha memekarkan Dusun Bangkali menjadi sebuah desa dengan alasan perkembangan masyarakat yang terus meningkat dari tahun ke tahun (P. Haridin, Wawancara 15 Maret 2018).

Usaha tersebut menuai hasil karena pada tanggal 15 April Tahun 1976, Desa Bangkali resmi menjadi sebuah desa berdasarkan surat keputusan pemerintahan daerah nomor 27 tahun 1976 tentang pemekaran dusun-dusun yang jauh dari desa induk. Latar belakang nama Desa Bangkali tidak lain merupakan nama yang diambil dari nama pohon kayu yaitu kayu bangkali yang banyak

terdapat di wilayah tersebut. Masyarakat kemudian mengabadikan pohon tersebut menjadi sebuah nama desa yaitu Desa Bangkali.

2.2 Proses Terbentuknya Desa Bangkali

2.2.1 Pemekaran Desa Bangkali Menjadi Desa Bangkali Percobaan (1976-1982)

Pembentukan Desa Bangkali telah didukung oleh beberapa hal seperti luas wilayah, kepadatan penduduk, sumber daya manusia, dan lain-lain. Pada tahun 1976, penduduk Desa Bangkali hingga tahun 1982 berjumlah 250 kepala keluarga (KK). Pada saat itu kondisi kehidupan penduduk sudah cukup berkembang baik dari aspek ekonomi, sosial dan budaya. Kondisi tersebut cukup menguatkan untuk dilakukannya pemekaran dari dusun menjadi desa.

Melalui berbagai pertimbangan, maka Kepala Desa Wali, bapak Abdul Majid menanggapi aspirasi tersebut dengan antusias dan positif. Hal tersebut karena mengingat tanggung jawab pemerintahan desa terhadap masyarakat. Belum lagi semakin hari jumlah penduduk semakin banyak (P. Haridin, wawancara 18 April 2018).

Tokoh-tokoh masyarakat yang berperan penting dalam pemekaran Desa Bangkali seperti: P. Haridin, L.B. Jamsir, La Toko, dan Abdul Majid melakukan berbagai upaya untuk segera mewujudkan harapan masyarakat untuk mendirikan sebuah desa tersendiri. Pada tahun 1976 pemerintah daerah kemudian menunjuk Muhamad Arsad sebagai Kepala Desa Bangkali yang pertama yang masa kepemimpinannya antara tahun 1976-1982 (Sumarno, wawancara 21 April 2018).

Ketika terdapat dukungan dari masyarakat Desa Bangkali, barulah diadakan koordinasi dengan pemerintah desa induk, dalam hal ini Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan lain-lain, untuk segera mengusulkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Muna tentang pemekaran daerah tersebut.

Tantangan kemudian muncul dalam upaya pemekaran Desa Bangkali tepatnya pada saat rapat konsolidasi. Desa tersebut dikatakan belum layak untuk dimekarkan, namun pada kenyataannya Desa Bangkali telah pantas untuk mekar sehingga hal tersebut ditentang keras oleh tokoh-tokoh masyarakat Desa Bangkali dengan mengatakan bahwa “jika Desa Bangkali tidak dimekarkan, maka tidak boleh satupun desa yang mekar”. Berkat dukungan dari masyarakat Desa Bangkali, akhirnya desa ini akhirnya dapat dimekarkan pada tahun 1976 sebagai salah satu desa sejak pertama kali adanya pemekaran wilayah (P. Haridin, Wawancara 16 April 2018).

Desa Bangkali mekar dari Desa Wali pada tahun 1976, tetapi menurut perkembangannya, masih dalam taraf desa pembantu dalam hal ini masih dalam bimbingan desa induk. Desa Bangkali dimekarkan secara kolektif pada tanggal 15 April Tahun 1976. Kepala desa pertama dipilih secara aklamasi oleh pemerintah daerah yakni dari anggota kepolisian yang pada waktu itu sedang bertugas di Kecamatan Wakorumba (Labuan) (P. Haridin, wawancara 16 April 2018).

2.2.2 Pemekaran Desa Bangkali menjadi Desa Definitif (1982-1986)

Desa Bangkali telah terbentuk pada tanggal 15 April 1976, tetapi pada kenyataannya desa ini tidak langsung berdiri sendiri atau definitif. Desa tersebut harus menjalani masa percobaan selama beberapa tahun sampai dianggap mampu menjalankan roda pemerintahan sendiri. Oleh karena itu, kepala desa yang baru saja dilantik merupakan pelaksana kepala desa dan masih dalam pengawasan dan bimbingan dari desa induk.

2.3 Perkembangan Desa Bangkali (1976-2017)

2.3.1 Perkembangan Politik dan Pemerintahan

Perkembangan politik Desa Bangkali jika dilihat dari awal terbentuknya desa tahun 1976, ditandai dengan penunjukan langsung kepala Desa Bangkali Muh. Arsad oleh pemerintah daerah. Setelah melihat perkembangan selama kurang lebih 6 tahun, akhirnya pada tahun 1982 desa ini menjadi desa definitif. Seiring dengan hal itu, maka diadakan pemilihan kepala desa yang pertama di

Desa Bangkali. Saat itu yang menjadi calon kepala desa yang akan dipilih adalah bapak La Ode Djiki berdasarkan suara terbanyak. Saat itu jumlah suranya hanya selisih 22 suara dengan kandidat suara terbanyak kedua yaitu Sumarno (Sumarno, wawancara 20 April 2018).

Hal tersebut berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2004 yang menerangkan bahwa “Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari desa warga negara Republik Indonesia dengan masa jabatan adalah 6 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan berikutnya” (Marbun, 2005: 178). Kemudian berdasarkan UU terbaru bahwa masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun dan dapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan secara berturut-turut maupun tidak secara berturut-turut. Demikian juga dengan jabatan badan permusyawaratan desa, mereka paling banyak menjabat selama 3 kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut (Undang-Undang Nomor 6 tahun 2004). Hal ini berbeda dengan UU yang berlaku sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 di mana kepala desa dan BPD hanya bisa menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan.

Tahun 1983 turunlah pelaksana baru kepada desa atas nama La Tongka dengan masa jabatan selama 1 tahun. Setelah itu beliau digantikan lagi oleh La Ndiawa sebab pemerintah daerah menganggap bahwa La Tongka tidak mampu melaksanakan tugas sebagai kepala desa. Kemudian pada tahun 1983 munculah undang-undang otonomi daerah yang berbunyi rakyat berhak menentukan pilihan sendiri. Pada masa itu beberapa orang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa Bangkali dan yang mencalonkan diri pada waktu itu antara lain 1) Sumarno, 2) La Ode Djiki dan La Muda yang dimenangkan oleh bapak La Ode Djiki (Sumarno, Wawancara 20 April 2018).

Tahun 1986 La Ode Djiki terpilih sebagai kepala desa dalam pemilu pertama dengan masa jabatan selama 5 tahun dari tahun 1983-1988. Saat itu BPD Desa Bangkali yaitu Sumarno. BPD bertugas membantu kepala desa untuk menyampaikan aspirasi masyarakat desa. BPD desa pada saat itu ditunjuk langsung oleh masyarakat. Pada tahun 1992 pemilihan umum kedua dilaksanakan di Desa Bangkali adapun yang terpilih pada saat itu adalah L.B. Jamsir dengan periode pemerintahan selama 1992-1998. Ia menjalankan roda pemerintahannya dibantu oleh sekretaris desa atas nama La Pataali (Sumarno, Wawancara 16 April 2018).

Ketika masa pemerintahan telah berjalan selama 6 tahun maka tibalah saatnya untuk kembali diadakan pemilihan kepala desa periode selanjutnya. Pada tahun 1998 pemilihan umum yang ketiga kembali dilaksanakan dan dimenangkan oleh La Fudi yang dibantu oleh La Ode Are sebagai sekretaris desa dengan masa bakti selama 1998-2008 (Sumarno, Wawancara 16 April 2018).

La Fudi dibantu oleh sekretaris desa La Ode Are. Sesuai UU Nomor 32 tahun 2008 bahwa struktur pemerintahan desa terdiri atas pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa. Pemerintahan desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri atas sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Sekretaris desa dijabat oleh seorang pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sehingga sejak berlakunya UU tersebut maka sekretaris desa harus berstatus pegawai negeri sipil. Pada tahun 2009 diadakan pemilihan kepala desa yang selanjutnya dan yang terpilih pada saat itu yaitu La Ode Awa Sm.Hk. Beliau menjabat selama 2 periode yaitu tahun 2009-2018 yang dibantu oleh La Ode Angka sebagai sekretaris desa (Sumarno, Wawancara 16 April 2018).

2.3.2 Perkembangan Infrastruktur

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia. Desa juga berperan untuk menanggulangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa. Desa juga berperan mengawal pembangunan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Perkembangan infrastruktur Desa Bangkali dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 7. Kronologi pembangunan Desa Bangkali

No.	Tahun	Kegiatan Pembangunan	Keterangan/ Sumber Dana
1	1980	Batas desa, balai desa, pembukaan lorong desa 1, 2, dan 3, balai pengobatan dan balai pengajian	swadaya
2	1986	Rehabilitasi perumahan rakyat, pembangunan taman kanak-kanak, pembangunan mesjid Al-Hasanah, pembangunan tempat deker, pembangunan rehap balai desa.	swadaya
3	2009	Pembangunan pustu	PNPM
4	2011	Pembangunan mesjid AN-NUR ISLAM	Alokasi Dana Desa (ADD)
5	2015	Pembangunan pasar Bangkali, jalan usaha tani panjang 1,5 kilo meter	Alokasi Dana Desa (ADD)
6	2016	Pembangunan gedung posyandu	Alokasi Dana Desa (ADD)

Sumber Data : Kantor Desa Bangkali Tahun 2017

Pada masa pemerintahan La Ode Djiki (1986-1991) bangunan fisik mulai nampak. Pada saat itu yang dilakukan adalah membangun rehabilitasi perumahan rakyat, pembangunan taman kanak-kanak, pembangunan mesjid Al-Hasanah, pembangunan tempat deker, pembangunan rehab balai desa (Sumarno, Wawancara 16 April 2018)

2.3.3 Perkembangan Ekonomi

Berdasarkan data Desa Bangkali Tahun 2017, kelompok mata pencaharian terbanyak adalah petani dengan jumlah 320 orang. Namun seiring berjalannya waktu terkadang pekerjaan masyarakat tidak menentu sehingga mereka menjalankan dua pekerjaan. Petani yang dimaksud bisa saja mempunyai pekerjaan lain misalnya berdagang atau melakukan pekerjaan lainnya. Kemudian disusul oleh kelompok peternak dengan jumlah 176 orang (Kantor Desa Bangkali Tahun 2017).

Masyarakat Desa Bangkali secara ekonomi mengalami perkembangan perekonomian. Sebelum Desa Bangkali mekar, belum terdapat bangunan pasar, sehingga kegiatan jual beli masyarakat masih tergolong jauh. Namun seiring dengan perkembangan dan mekarnya Desa Bangkali, saat ini telah dibangun pasar. Hal tersebut tentu berdampak bagi perkembangan perekonomian masyarakat. Selain jangkauan yang sudah dekat, masyarakat juga bisa menjadi pedagang langsung di pasar yang telah disediakan oleh pemerintah, sehingga mata pencaharian masyarakat bertambah dan tidak bertumpu pada pertanian, perkebunan dan peternakan saja (Wawancara, 10 April 2018).

3. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian di atas maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Desa Bangkali Kecamatan Watopute Kabupaten Muna dibentuk karena pertimbangan luas wilayah dan kondisi kepadatan penduduk sudah cukup memadai untuk dimekarkan. Selain itu, masyarakat Desa Wali merasa kesulitan dalam pengurusan administrasi kependudukan sebab wilayah Desa Wali sangat luas dengan kepadatan penduduk yang maksimal.
2. Desa Bangkali terbentuk melalui dua proses, yakni: (a) Diawali dengan kebijakan pemerintah bahwa setiap dusun yang jauh dari desa induk harus dimekarkan agar mudah dalam proses administrasi. Oleh karena itu, timbul semangat untuk memekarkan desa-desa yang ada di sekitar Desa Wali (Desa Induk). (b) Dukungan dari masyarakat desa serta tokoh masyarakat untuk segera mengusulkan pemekaran desa tersebut kepada pemerintah daerah. Kemudian terbentuklah Desa Bangkali pada tanggal 15 April 1976 melalui surat keputusan nomor 27 tahun 1976 tentang pemekaran desa-desa yang ada di Desa Wali.
3. Perkembangan Desa Bangkali tahun 1976-2017 secara umum menunjukkan perkembangan yang cukup baik di bidang politik, pemerintahan umum, infrastruktur, dan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu, Ahmadi. 2001. *Pengantar Sosiologi*. Solo: Ramdani.
- Arif, Muhamad. 2011. *Pengantar Kajian Ilmu Sejarah*. Bandung: Yrama Widya.
- BPS (Badan Pusat Statistik). 2013. *Muna dalam Angka 2013*. Kabupaten Muna: BPS.
- Garna, K. Yudistira. 1993. *Teori-Teori Perubahan Sosial*. Bandung: Pasca Sarjana Universitas Pajajaran.
- Hadisuarso, 1981. *Konsepsi Dasar Pengetahuan Wilayah di Indonesia*. Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum.
- Haridin, P. 2001. *Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan 6 (Enam) Kecamatan Pembantu Menjadi Kecamatan Definitif*. Raha: Kantor Daerah Kabupaten Muna.
- Jusnawati, 2010 *Sejarah pembentukan Desa Wia-Wia Kecamatan Poli-Polia Kabupaten Kabupaten Kolaka (1999-2003)*. Skripsi. Kendari: FKIP UHO.
- Kuntowijoyo, 2003. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- _____, 2013. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Lerissa, R.Z. 1996. *Historiografi Umum Rencana Perkuliahan (Program Register Studi Sejarah, UI)*. Jakarta: UI Press.
- Majid, M, Dien. 2014. *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Marbun, 2005. *Otonomi Daerah 1945-2005 Prosedur dan Realita (Perkembangan Otda, Sejak Zaman Kolonial Sampai Saat Ini)*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Pusat Hukum dan Humas, 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jakarta: Kemendagri.
- Sajogyo dan Pujiwati. 1995. *Sosiologi Pedesaan "Kumpulan Bacaan"*. Yogyakarta: Gajah Mada University Pres.
- Setiawan, Ebta. 2010. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Offline Versi 1.3)*. Pusat Bahasa. Jakarta: Kemendiknas.
- Soekanto, Soerjono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Subroto, 2009. *Dampak Perkembangan Iptek*, Jakarta: Gramedia
- Suryadiningrat, Bayu. 1992. *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. Jakarta: Rineka Cipta.



9 772614 439002